

**DETERMINAN DISHARMONI KUA-PPAS
TERHADAP APBD
DI KABUPATEN TABANAN**

**I Gusti Ayu Widia Asri¹
I.K.G Bendesa²
Ida Ayu Nyoman Saskara³**

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
Email : widiaasri.se56@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis variabel-variabel penyebab disharmoni antara KUA-PPAS dengan APBD pada Pemerintahan Kabupaten Tabanan serta menganalisis variabel yang paling dominan penyebab disharmoni antara KUA-PPAS dengan APBD. Variat KUA-PPAS yang terdiri dari variabel kompetensi SDM, dana perimbangan/ transfer, dan transparansi publik, sedangkan variat APBD yang terdiri dari variabel perencanaan anggaran, dan politik anggaran melalui Analisis korelasi *canonical*. Hasil analisis menunjukkan bahwa, untuk variat KUA-PPAS, korelasi yang paling tinggi adalah variabel transparansi publik karena transparansi publik dapat mengakomodasi partisipatif masyarakat terkait anggaran dan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi dan dalam pengambilan keputusan. Variabel lain yang mempunyai korelasi tinggi dengan variat KUA-PPAS adalah Kompetensi SDM yang merupakan pelaku dari tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Untuk variat APBD, variabel yang korelasinya tertinggi adalah perencanaan anggaran karena perencanaan anggaran merupakan instrument terpenting bagi pemerintah dalam menetapkan prioritas – prioritas program pembangunan yang didukung oleh data-data yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Kata Kunci : Perencanaan anggaran, politik anggaran, dana perimbangan, SDM, transparansi publik, APBD dan KUA-PPAS.

ABSTRACT

Research purposes to analyze the variables cause disharmony between KUA-PPAS with Government budget in Tabanan District Government and analyze the variables dominant cause of disharmony between KUA-PPAS with the budget. Variat KUA-PPAS consists of variable competence of human resources, balancing funds / transfer, and public transparency, while variat budget consists of variable budget planning and budget politics through canonical correlation analysis. Result of Hypothesis testing indicates, for variat KUA-PPAS, the highest correlation is variable public transparency because public transparency can accommodate the budget related to community participation and can provide information to the parties concerned as the evaluation and decision-making. Other variables that have a high correlation with variat KUA-PPAS is the competence of human resources is the perpetrator of the planning, budgeting to implementation. For variat budget, the highest correlation variables are planning a budget because the budget planning is an important instrument for the government in setting priorities of development programs supported by the data that is accurate and in accordance with the rules.

Keywords: Budget planning, budget politics, the balance funds, human resources, public transparansi, Budgets and KUA-PPAS.

PENDAHULUAN

APBD merupakan salah satu instrumen utama pembangunan daerah dalam rangka memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta menyediakan pelayanan dasar yang memadai bagi masyarakat. Strategi penganggaran dalam APBD tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan akuntabel. Berpijak pada kondisi makro ekonomi daerah, asumsi-asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proyeksi pendapatan daerah serta prioritas pembangunan yang telah disepakati, selanjutnya dialokasikan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) untuk program/ kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mewujudkan target kerja serta prioritas pembangunan tersebut.

Proses penyusunan Rancangan APBD pada umumnya didahului dengan penyusunan kerangka kebijakan anggaran berupa KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Kebijakan di bidang keuangan merupakan pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan suatu pemerintah daerah.

Penganggaran terpadu yang berdasarkan peraturan yang ada yaitu:

“Penganggaran terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. (Permendagri 13 Tahun 2006)”.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atas perubahan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai pedoman dalam pelaksanaan, penatausahaan APBD dan laporan keuangan juga mencakup kebijakan akuntansi. Prinsip penyusunan APBD yaitu :

“(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah daerah, (2) APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal, (3) Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD, (4) Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat, (5) APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, (6) Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. (Permendagri Nomor 21 Tahun 2011)”.

Disharmoni antara KUA-PPAS dengan APBD dapat juga dikarenakan prosedur dalam pelaksanaan dana perimbangan/transfer ke daerah belum optimal. Direktorat Dana Perimbangan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi, standarisasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang Transfer ke Daerah.

Permasalahan umum yang menjadi kendala terlambatnya dana perimbangan/transfer ke daerah dikarenakan keterlambatan informasi, dalam penyediaan data dasar penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Keterlambatan penyampaian data perkiraan penerimaan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), diakibatkan karena penetapan

Anggaran Pusat bersamaan dengan penetapan APBD di Daerah, sehingga proses penyusunan PMK untuk penetapan alokasi bagian daerah juga sering mengalami keterlambatan informasi yang diterima oleh pemerintah daerah.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik adalah :

“Proses penganggaran merupakan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dilakukan sesuai dengan tahapannya. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan berdampak pada perencanaan yang telah disusun. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2004)”.

Mekanisme penganggaran di Kabupaten Tabanan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari tingkat pemahaman terhadap anggaran maupun dari kepentingan terhadap anggaran. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan harmonisasi antar SKPD. Ketidak sesuaian antar kode rekening program maupun antar kode rekening kegiatan. Perbedaan ini diyakini dapat menyebabkan terjadinya disharmoni dalam proses penyusunan anggaran yaitu antara KUA-PPAS dengan APBD. Penyebab lain terjadinya disharmoni antara dokumen KUA-PPAS dengan APBD di Kabupaten Tabanan disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, sebagian besar anggaran 70 persen digunakan untuk belanja pegawai sehingga sangat tergantung dengan dana dari pusat.

Tabel 1
Disharmoni antara KUA - PPAS dan APBD
Kabupaten Tabanan Tahun 2010 – 2014

Tahun	KUA-PPAS		APBD	
	Pendapatan (Jutaan Rp)	Belanja Daerah (Jutaan Rp)	Pendapatan (Jutaan Rp)	Belanja Daerah (Jutaan Rp)
2010	655.006.500	696.918.700	655.099.000	696.921.320
2011	855.701.600	905.755.620	870.487.000	920.541.200
2012	952.896.800	993.416.800	956.531.600	996.251.600
2013	1.107.276.600	1.138.996.600	1.110.810.800	1.142.530.800
2014	1.252.687.700	1.257.407.735	1.260.942.535	1.287.757.355

Sumber : Pemerintah Kabupaten Tabanan KUA-PPAS dan APBD 2010 – 2014
 (data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dalam periode 5 (lima) tahun terlihat adanya disharmoni antara APBD dengan KUA-PPAS. Selisih pendapatan dan belanja daerah antara APBD dengan KUA-PPAS dalam periode tahun 2010 sampai 2014. Tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Menganalisis korelasi antara variat KUA-PPAS dengan variat APBD Kabupaten Tabanan.
- 2) Menganalisis variabel dominan yang mempengaruhi disharmoni antara KUA-PPAS dengan APBD di Kabupaten Tabanan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabanan. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tabanan, mengingat terjadinya revisi anggaran di tahun berjalan, SDM yang kurang mendapat pelatihan, terdapat penatausahaan keuangan yang tidak tertib dan sumber pendanaan lebih kecil dari

anggaran kegiatan, Terlambatnya Pemda menyerahkan KUA-PPAS ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berimplikasi pada keterlambatan waktu penyusunan RKA SKPD dan RAPBD.

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, sedangkan populasinya yaitu pengelola keuangan pada 40 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dengan *purposive sampling* yang mengambil 3 (tiga) orang pengelola keuangan di masing-masing SKPD Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan anggaran. Sampel yang diambil langsung menjadi responden dalam penelitian sehingga jumlah responden menjadi 120 orang.

Definisi Operasional Variabel

1) Kompetensi SDM

Kompetensi SDM adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan. Kemampuan SDM itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas.

2) Politik Anggaran

Dukungan politis yang sangat kuat dan konsisten dari legislatif sangat penting dalam memulai penerapan *performance based budgeting* pada pemerintah daerah. Legislator terlibat dalam penetapan tujuan, membangun indikator kinerja, memantau proses dan mengevaluasi hasil. Legislatif menggunakan hak *budgeting* untuk memenuhi aspirasi masyarakat, sehingga banyak terjadi pergeseran anggaran. Hal ini berimplikasi pada disharmoni antara RAPBD yang ditetapkan dengan KUA-PPAS yang telah disusun sebelumnya. Penganggaran kinerja tidak mungkin berhasil jika pihak eksekutif dan legislatif berbeda pendapat mengenai pentingnya reformasi penganggaran kinerja.

3) Perencanaan Anggaran

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan dalam skala daerah dan nasional. Daerah sebagai suatu bagian dari organisasi pemerintahan harus menyusun perencanaan guna mencapai tujuan pembangunan dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan diperlukan karena keinginan masyarakat yang tak terbatas sedangkan sumber daya (anggaran) yang ada terbatas. Anggaran merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk menetapkan prioritas program pembangunan di tingkat daerah. Anggaran dalam APBD menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun, yang mana merupakan hasil akhir dari proses perencanaan dan penganggaran daerah selama setahun penuh.

4) Dana Perimbangan/transfer

Kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu: (a) memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya; (b) mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah, (c) meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta (d) meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

5) Transparansi publik

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi

yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis korelasi *canonical* yaitu model statistik multivariat yang menganalisis interrelasi antara satu set variabel dependen dengan satu set variabel independen (Bendes, 2015). Ada tiga kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan dalam memutuskan fungsi kanonikal mana yang diinterpretasikan, pertama, tingkat signifikan statistik dari pada fungsi. Kedua, besaran atau magnitude korelasi kanonikal. Ketiga, Ukuran *Redundancy*.

Korelasi *canonical* secara simultan memprediksi multiple variabel *dependen* dengan multiple variabel *independen*, seperti terlihat pada gambar sebagai berikut:

Faktor KUA-PPAS		Faktor APBD
1) Kompetensi SDM	}	4) Perencanaan Anggaran
2) Dana Perimbangan/ transfer		}
3) Transparansi publik		
<i>Komposit Variabel Independen</i>	<i>Korelasi Canonical</i>	<i>Komposit Variabel Dependen</i>
<i>Variat Canonical Independen</i>	R_c	<i>Variat Canonical Dependen</i>

Gambar
Korelasi Canonical antara Variat KUA-PPAS dengan Variat APBD

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, karakteristik pengelola keuangan dapat dilihat melalui demografi pengelola keuangan. Demografi pengelola keuangan menerangkan secara umum mengenai pengelola keuangan di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Demografi Pengelola keuangan pada penelitian ini meliputi, umur, jenis kelamin dan pendidikan terakhir

Umur Pengelola Keuangan

Karakteristik Pengelola Keuangan berdasarkan umur menunjukkan bahwa Pengelola Keuangan didominasi oleh Pengelola Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tabanan yang berada pada kelompok umur diatas 50 tahun. Pengelola keuangan di masing–masing SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan didominasi pada rentang umur diatas 50 tahun sebesar 45,8 persen, 26,7 persen berada pada rentang umur 45 sampai dengan 49 tahun, 11,7 persen pada rentang umur 40 sampai dengan umur 44 tahun dan sisanya berada di bawah 40 tahun.

Jenis kelamin Pengelola Keuangan

Karakteristik Pengelola Keuangan ditinjau dari jenis kelamin, data menunjukkan dari 120 orang didominasi oleh pengelola keuangan laki-laki terdiri dari 107 dan sisanya 13 berjenis kelamin perempuan. Pengelola Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan di dominasi oleh laki-laki sebanyak 89,2 persen, sedangkan sisanya sebanyak 10,8 persen.

Pendidikan Pengelola Keuangan

Pendidikan Pengelola Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Tabanan memiliki pendidikan yang tinggi. Data menunjukkan Pengelola Keuangan di masing-masing SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan cenderung berada pada kelompok jenjang pendidikan Sarjana, baik itu S1 maupun S2 sedangkan sisanya jenjang pendidikan dibawah sarjana.

Jenjang Pendidikan Pengelola Keuangan SKPD menunjukkan bahwa Pengelola Keuangan yang ada di masing-masing SKPD di lingkungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan pendidikan Sarjana S1 sebanyak 65,0 persen, 30,8 persen yang didominasi oleh sarjana Ilmu Sosial Politik sedangkan dengan pendidikan sarjana S2, 3,3 persen dan sisanya dari Diploma dan SMA.

Hasil Analisis Canonical

Dalam analisis kanonikal ada tiga kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan dalam memutuskan fungsi kanonikal mana yang diinterpretasikan, pertama, tingkat signifikan statistik dari pada fungsi. Tingkat signifikan korelasi kanonikal pada umumnya yang dapat diterima untuk interpretasi adalah minimum 0,05 (bersama-sama dengan 0,01). Tingkat ini secara umum dapat diterima bahwa koefisien korelasi adalah signifikan. Tes yang umum dipakai dan tersedia dalam paket komputer adalah statistik F. Disamping tes untuk masing-masing fungsi canonical secara terpisah, tes multivariate semua *canonical roots* juga dapat digunakan untuk mengevaluasi signifikansi *canonical roots*. Tes yang dapat digunakan antara lain: Wilks' lambda, Hotelling's trace, Pillai's trace, dan Roy's. Kedua, besaran atau magnitude korelasi kanonikal. Keputusan

menentukan besaran korelasi kanonikal biasanya didasarkan pada kontribusi penemuan terhadap hasil riset yang dilakukan. Nampaknya hal yang logis adalah saran atas signifikansi *factor loading* dapat digunakan dengan korelasi kanonikal. Ketiga, Ukuran *Redundancy*. Indeks redundancy Stewart-Love menghitung jumlah varians dari satu set variabel yang dapat dijelaskan oleh varians dari set lainnya. Indeks ini sebagai ukuran *accounted-for variance*, serupa dengan perhitungan R^2 dalam regresi multiple. Perhitungan indeks redundancy meliputi tiga langkah. Langkah pertama perhitungan jumlah *shared variance* dari set variabel dependen yang dimasukkan dalam variat kanonikal dependen. Langkah kedua menghitung jumlah varians dalam variat kanonikal dependen yang dapat dijelaskan oleh variat kanonikal independen. Langkah terakhir, menghitung indeks redundansi, dengan mengalikan kedua komponen tersebut.

Korelasi antara variat KUA-PPAS dengan variat APBD

Untuk menganalisis apakah ada hubungan antara variat KUA-PPAS dengan variat APBD dalam disharmoni KUA-PPAS dengan APBD di gunakan analisis korelasi *canonical*. Dalam menggunakan analisis *canonical* untuk dua varietas, variat KUA-PPAS yang terdiri dari tiga variabel yaitu kompetensi SDM dana perimbangan/transfer dan transparansi publik dan variat APBD terdiri dari dua variabel yaitu perencanaan anggaran, dan politik anggaran, maka diasumsikan variat KUA-PPAS sebagai variabel independen sedangkan variat APBD sebagai variabel dependen

Model korelasi *canonical* ditunjukkan dalam fungsi *canonical* sebagai berikut :

$$\text{KUA-PPAS}_m = a_{m1}X_1 + a_{m2}X_2 + a_{m3}X_3$$

$$APBD_m = b_{m1}Y1 + b_{m2}Y2$$

Dimana C_m adalah korelasi Canonical antara KUA-PPAS_m dan APBD_m dan korelasi ini maksimum. Tujuan daripada korelasi canonical adalah mengidentifikasi m set canonical varietas, (KUA-PPAS₁,APBD₁), (KUA-PPAS₂, APBD₂,, (KUA-PPAS_m,APBD_m), sehingga korelasi canonical $C_1, C_2, . . . , C_m$ adalah maksimum. Hasil perhitungan ditunjukkan pada tabel 2 dan 3. Tabel 2 pada fungsi 1 corelasi canonical diperoleh 0,860 yang menggambarkan hubungan antara KUA-PPAS dengan APBD sebesar 86 persen dan korelasi ini sangat signifikan ($p=0,000$). Koefisien determinasi 0,739 angkanya sangat moderat yang menggambarkan kekuatan determinan. Pada fungsi 2 corelasi canonical diperoleh 0,085 yang menggambarkan hubungan antara KUA-PPAS dengan APBD sebesar 8,5 persen dengan koefisien determinasi 0,007 lebih rendah dibandingkan dengan fungsi 1, menunjukkan angka cukup moderat namun fungsi 2 kurang ini dapat menggambarkan kekuatan determinan mengingat R^2 canonical ini dimiliki oleh ke dua variat baik variat KUA-PPAS maupun variat APBD. Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa fungsi 1 lebih berarti dibanding fungsi 2.

Tabel 2
Pengukuran Model Fit Bagi Analisis Korelasi Canonical

Fungsi Canonical	Korelasi Canonical	R^2 Canonical	Statistik F	Probabilitas
1	0,860	0,739 (=,860 ²)	36,929	0,000
2	0,085	0,007 (=,085 ²)	0,430	0,000

Sumber : Hasil Analisis data primer, 2015

Demikian pula tes multivariate untuk semua canonical roots yang ditunjukkan oleh Wilk's lambda, Pillai's trace, Hotelling's trace, dan Roy's sangat signifikan ($p=0,000$) pada tabel 3, menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variat KUA-PPAS dengan variat APBD

Tabel 3
Test Signifikansi Multivariate

Statistik	Nilai	Statistik F	Probabilitas
Wilk's lambda	0,316	9,815	0,000
Pillais trace	0,684	20,127	0,000
Hotellings	2,157	40,986	0,000
Roys	0,683		

Sumber : Hasil analisis data primer, 2015

Variabel yang dominan mempengaruhi disharmoni antara KUA-PPAS dengan APBD

Untuk menganalisis variabel dominan yang mempengaruhi disharmoni antara KUA-PPAS dengan APBD ditunjukkan pada tabel 5.15 dalam perhitungan indek *redundancy*. Indek *redundancy* Stewart-Love menghitung jumlah varians dari satu set variabel yang dapat dijelaskan oleh varians dari set lainnya. Indek ini sebagai ukuran *accounted-for variance*, serupa dengan perhitungan R^2 dalam regresi multiple. R^2 merupakan jumlah varians dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh fungsi regresi daripada independen variabel (Bendesa, 2015).

Tabel 4
Perhitungan Indeks Redundancy

Variate/ Variables	Canonical Loading	Kuadrat Canonical Loading	Rata-rata Kuadrat Loading	R ² Canonical	Indeks Redundancy
Variabel dependen					
X1	0,925	0,855			
X2	0,921	0,848			
Variat Dependen APBD		1,703	0,851	0,739	0,629
Variabel Independen					
Y1	0,894	0,799			
Y2	0,829	0,687			
Y3	0,903	0,815			
Variat Independen KUA-PPAS		2,301	0,767	0,739	0,566

Sumber : Hasil analisis data primer, 2015

Keterangan :

X1 : Perencanaan anggaran

X2 : Politik Anggaran

Y1 : Kompetensi SDM

Y2 : Dana Perimbangan/ transfer

Y3 : Transparansi Publik

Berdasar Tabel 4 dapat menjelaskan hubungan antar variabel :

Variat KUA-PPAS		Variat APBD
1) Kompetensi SDM	} = 0,894 {	4) Perencanaan Anggaran = 0,925
2) Dana Perimbangan/ transfer		5) Politik Anggaran = 0,921
3) Transparansi Publik		= 0,903
<i>Komposit Variabel Independen</i>	<i>Korelasi Canonical</i>	<i>Komposit Variabel Dependen</i>
<i>Variat Canonical Independen</i>	Rc = 0,860	<i>Variat Canonical Dependen</i>

Gambar 2
Hasil Korelasi Canonical

Perhitungan Indeks Redundansi menjelaskan bahwa hal sebagai berikut :

1) Pengaruh Perencanaan anggaran terhadap APBD

Untuk variat APBD korelasi yang paling tinggi adalah variabel perencanaan anggaran yang sekaligus merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi disharmoni KUA-PPAS terhadap APBD. Dilihat dari nilai *canonical loading* pada perhitungan indeks *redundancy* untuk variabel perencanaan anggaran dengan perolehan nilai paling tinggi yaitu 0,925 persen, menunjukkan bahwa 92,5 persen variabel perencanaan anggaran mempengaruhi APBD. Hasil analisis diperkuat dengan distribusi frekuensi pengelola keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan menurut variabel perencanaan anggaran tahun 2015. Dijelaskan bahwa distribusi jawaban responden cenderung pada nilai 4 dan 5 yang memiliki rata-rata skors sebesar 75,43. Disharmoni terjadi dalam penyusunan anggaran masih terjebak ke dalam pola lama penyusunan program yaitu membuat program sebanyak banyaknya tanpa didasarkan pada sumber daya daerah yang tersedia dan tujuan dari prioritas pembangunan daerah serta kurang memahami prosedur perencanaan anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Saponah (2010) yang menyatakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan kebijakan di daerah. Dokumen ini mempunyai fungsi yang sangat strategis karena menyangkut pilihan terhadap program, kegiatan dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Lidya Elfrina (2014) yang mengatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap dokumen KUA-PPAS dengan APBD namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dudi Iskandar (2013) yang membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sinkronisasi dokumen KUA-PPAS dengan APBD, dengan kata lain perencanaan anggaran tidak mampu mensinkronkan antara dokumen KUA-PPAS dengan APBD.

2) Pengaruh Politik anggaran terhadap APBD

Nilai dari *canonical loading* pada perhitungan indek redundancy untuk variabel politik anggaran yaitu 0,921, menunjukkan bahwa korelasi antara variabel politik dengan APBD sebesar 92,1 persen . Hasil penelitian didukung oleh distribusi frekuensi pengelola keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan menurut variabel politik anggaran tahun 2015. Dijelaskan pada distribusi jawaban responden yang terkonsentrasi pada nilai 4 dan 5 dengan rata-rata skor sebesar 77,75. Disharmoni ini disebabkan dari beberapa faktor diantaranya terdapat unsur kepentingan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dinyatakan oleh Hagen et al. (1996) menyimpulkan bahwa penganggaran di sektor publik merupakan suatu *bargaining process* antara eksekutif dan legislatif. Sementara Freeman & Shoulders (2003) dalam Syukri dan Asmara (2006) menyatakan bahwa anggaran yang ditetapkan dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif. Menurut Rubin (1993) dalam Syukri dan Asmara (2006),

penganggaran publik adalah pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai *budget actors* yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap *outcomes* anggaran. Proses penyusunan APBD menurut Subechan, 2012 adalah sebagai berikut :

“proses penyusunan APBD tergantung hubungan antara pemda (bupati/eksekutif) dengan DPRD (legislatif). Hubungan yang baik dan selaras dapat mendorong penyusunan APBD yang efektif dan efisien. Disharmoni Dokumen KUA-PPAS Kabupaten Tabanan dengan APBD yang disebabkan kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif dalam perencanaan anggaran yang berakibat pada keterlambatan penetapan APBD. Begitu juga penelitian Amin Bagus Panuntun (2012) mengatakan bahwa Politik Anggaran berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen KUA-PPAS dengan APBD”.

3) Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia terhadap KUA-PPAS

Nilai dari *canonical loading* pada perhitungan indek redundansi untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu sebesar 0,894, menunjukkan bahwa korelasi antara kompetensi SDM dengan KUA PPAS sebesar 89,4 persen. Hasil penelitian didukung oleh distribusi frekuensi pengelola keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan menurut variabel kompetensi sumber daya manusia tahun 2015. Dijelaskan bahwa distribusi jawaban responden cenderung pada nilai 4 dan 5 yang memiliki rata-rata skors sebesar 83,83. Disharmoni ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sumber daya yang terlibat dalam

penyusunan anggaran kurang memahami pedoman yang terkait dalam penyusunan perencanaan anggaran, kurang mampu berinteraksi dengan sistem yang terkait dengan penyusunan perencanaan anggaran.

Distribusi frekuensi Pengelola keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan menurut Pendidikan Tahun 2015 dari 40 SKPD hanya 4,1 persen yang berpendidikan dibawah Strata 1 (S1), sisanya sebanyak 95,8 persen berpendidikan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Yang didominasi oleh sarjana dengan ilmu sosial politik. Namun permasalahan yang ada pendidikan bukan cerminan dari seseorang untuk bisa dan mampu memahami proses penyusunan anggaran. Prilaku dan keinginan seseorang untuk mau belajar dan mengembangkan diri merupakan hal terpenting dalam memperkaya ketrampilan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran harus mampu mengintegrasikan data dengan program aplikasi komputer yang dapat mempermudah proses monitoring dan evaluasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Utari (2009) yang menemukan beberapa kendala dan hambatan dalam Penyusunan anggaran berbasis kinerja antara lain struktur SKPD belum memberikan ruang yang cukup bagi penyusunan perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi, tim anggaran belum terlibat secara penuh pada setiap tahapan perencanaan, kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal, dan keterbatasan anggaran daerah.

Rahayu (2007) melakukan penelitian tentang studi *fenomenologis* terhadap penyusunan anggaran daerah pada satuan kerja perangkat daerah. Hasilnya

menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan dan motivasi kerja para aparatur daerah sehingga memunculkan: perilaku resisten, berupa keengganan para aparatur terhadap perubahan kebijakan penyusunan anggaran yang masih ditemukan di lapangan, dan perilaku tidak efisien dan tidak efektif dari penyusun anggaran.

Spencer and Spencer, (1993 : 9) Kompetensi adalah sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya (*an underlying characteristic's of an individual which is causally related to criterion – referenced effective and or superior performance in a job or situation*). *Underlying Characteristics* mengandung makna kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. *Causally Related* memiliki arti kompetensi adalah sesuatu yang menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. *Criterion Referenced* mengandung makna bahwa kompetensi sebenarnya memprediksi siapa yang berkinerja baik, diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Kravetz (2004), bahwa kompetensi adalah sesuatu yang seseorang tunjukkan dalam kerja setiap hari. Fokusnya adalah pada perilaku di tempat kerja, bukan sifat-sifat kepribadian atau keterampilan dasar yang ada di luar tempat kerja ataupun di dalam tempat kerja.

4) Dana perimbangan/ transfer mempengaruhi KUA-PPAS

Nilai dari canonical loading pada perhitungan indek redundancy untuk variabel dana perimbangan/ transfer yaitu sebesar 0,829, menunjukkan bahwa

korelasi antara dana perimbangan/ transfer dengan KUA-PPAS sebesar 82,9 persen. Hasil penelitian didukung oleh hasil distribusi frekuensi pengelola keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan menurut variabel dana perimbangan /transfer tahun 2015 memiliki cenderung pada nilai 4 dan 5 dengan jumlah rata-rata skor sebesar 89,34 menunjukkan dana perimbangan/ transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap disharmoni KUA-PPAS dengan APBD Kabupaten Tabanan.

Penelitian ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Ristriardani (2011) mengatakan bahwa dana perimbangan/ transfer berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD. Begitu juga penelitian Gregorius Nasiansenus, Masdjojo dan Sukartono (2008). Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan APBD, dikarenakan keterlambatan turunnya dana perimbangan berimbas pada lambatnya penetapan APBD. Hal ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan I Gusti Ngurah Agung Suardika, SE hasil wawancara yang dilakukan di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan pada tanggal 26 Juni 2015 yaitu :

“Disharmoni Antara APBD dan KUA-PPAS dari dana perimbangan/transfer diakibatkan penetapan tahun anggaran yang sama antara pusat dan daerah sehingga seringkali dipasang plafon merujuk tahun sebelumnya. Namun dalam pelaksanaannya sudah mengacu pada pedoman yang berlaku.”

5) Pengaruh Transparansi publik terhadap KUA-PPAS

Nilai dari canonical loading pada perhitungan indeks redundancy untuk variabel transparansi public yaitu sebesar 0,903, menunjukkan bahwa korelasi

antara transparansi publik dengan KUA-PPAS sebesar 90,3 persen. Nilai dari Hasil penelitian didukung oleh distribusi frekuensi pengelola keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan menurut variabel transparansi publik tahun 2015. Dijelaskan pada distribusi jawaban responden yang terkonsentrasi pada nilai 4 dan 5 dengan rata-rata skor sebesar 76,67. Disharmoni ini disebabkan kurang terbukanya akses terhadap anggaran publik baik secara tradisional maupun media online serta kurang antusiasnya masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Partisipatif (PAP). Selarasnya penyusunan anggaran pada sektor publik ketika pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat bekerjasama dalam pembuatan anggaran yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Andrianto (2007) yang mengatakan bahwa Transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi tentang sektor keuangan publik. Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu. Maria Hehanusa (2010) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran berpengaruh pada kinerja aparat melalui *Job Relevant Information* dan kepuasan kerja.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang didalamnya memuat setiap informasi publik bersifat terbuka dan diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Menurut Saponah (2003) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat

maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri. Pada Wikipedia (2014) partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya.

Hasil perhitungan *indek redundancy* untuk variat APBD sebesar 0,628 ini berarti bahwa variasi dalam variat dependen yaitu APBD, 62,8 persen ditentukan oleh variat independen yaitu KUA-PPAS. Hasil perhitungan *indek redundancy* untuk variat KUA-PPAS sebesar 0,566 ini berarti bahwa variasi dalam variat independen yaitu KUA-PPAS, 56,6 persen ditentukan oleh variat dependen atau APBD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel perencanaan anggaran merupakan variabel paling dominan penyebab disharmoni antara KUA-PPAS dengan APBD pada Pemerintahan Kabupaten Tabanan, yaitu sebesar 92,5 persen. Perencanaan anggaran berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan dikarenakan anggaran merupakan instrument paling penting bagi pemerintah dalam menetapkan prioritas-prioritas program pembangunan. Esensi utama dalam merencanakan anggaran yaitu menghimpun elemen indikator kinerja dalam proses penyusunan APBD. Maka seluruh program/kegiatan yang akan didanai harus memiliki tujuan/sasaran yang terukur, memperoleh keuntungan dan bermanfaat bagi masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Terdapat korelasi yang signifikan antara variat KUA-PPAS dengan variat APBD. Untuk variat KUA-PPAS, korelasi yang paling tinggi adalah variabel transparansi publik karena transparansi publik dapat mengakomodasi partisipatif masyarakat terkait anggaran dan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi dan dalam pengambilan keputusan. Variabel lain yang mempunyai korelasi tinggi dengan variat KUA-PPAS adalah Kompetensi SDM yang merupakan pelaku dari tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Untuk variat APBD, variabel yang korelasinya tertinggi adalah perencanaan anggaran yang juga merupakan variabel dominan yang mempengaruhi disharmoni antara KUA-PPAS dengan APBD Kabupaten Tabanan, karena perencanaan anggaran merupakan instrument terpenting bagi pemerintah dalam menetapkan prioritas – prioritas program pembangunan yang didukung oleh data-data yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan hasil penelitian untuk variabel kompetensi SDM (Pengelola Keuangan) di masing-masing SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki pengaruh dalam menentukan penyusunan anggaran, maka dalam penempatan pegawai yang sebelumnya tidak sesuai dengan pendidikan dan kemampuan kedepan hendaknya menyesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki (*The right man on the right place*) dan kebutuhan organisasi. Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan anggaran maka tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam perencanaan anggaran supaya kedepannya memprioritaskan anggaran untuk sarana prasarana penunjang

SIPKD seperti komputer, jaringan online dan jaringan internet pada SKPD sehingga mampu berinteraksi dengan SIPKD untuk menghasilkan data secara cepat, tepat dan akurat.

REFERENSI

- Andrianto, Nico. 2007 *Transparansi dan Akuntabilitas Publik* melalui E-Government. Malang: Bayumedia Publising.
- Bendesa IKG, 2015. *Modul Analisis Canonical*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.
- Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting—Theory and Practice. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.*
- Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono, 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten / Kota di Jawa Tengah*
- Hagen, Terje P., Rune J. Sorensen, & Oyvind Norly. 1996. *Bargaining strength in budgetary process: The impact of institutional procedures. Journal of Theoretical Politics.*
- Iskandar, Dudi. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Penganggaran, Politik Penganggaran dengan Transparansi Publik Sebagai Variabel Moderating Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.*(Tesis)
- Isa Wahyudi, 2010, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).*
- Kravetz. .2004. *Human Resource Management . McGraw-Hill, Boston*
- Lidya Elfrina, 2014. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Politik Anggaran, dan Informasi Pendukung dengan Transparansi Publik sebagai Variabel Moderating terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS” (studi empiris pada SKPD Kabupaten Lingga) (tesis).

- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rubin 1993 dalam Syukriy Abdullah Jhon Andra Asmara 2006 *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah*; Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik Simposium Nasional Akuntansi.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Rahayu, Sri. 2007. Studi Fenomologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah (Bukti empiris dari Satuan Kerja perangkat Daerah)
- Ristriardani, 2011. *Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita dan Disparitas Pendapatan antar Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Spencer, Lyle M dan Signe M. Spencer, 1993. *Compete4nce At Work : Models For Superior Performance*. New York : John Wilky & Sons, Inc.
- Sopannah, 2003, Pengaruh *Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA), Ke VI, di Surabaya.
- Sopannah. 2010, Studi Fenomenologis : Menguak Parsisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD.
- Subechan dkk,2012. *Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus*, Artikel dimuat dalam Jurnal Wacana Kinerja (Tesis.)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, *Tentang keterbukaan Informasi Publik*.
- Utari , Nuraeni. 2009. Studi Fenomologis tentang “Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.” (tesis)